

TAJUK

Waspada Booming Properti

PEKAN lalu Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas dan regulator moneter, menurunkan kembali suku bunga acuannya (BI rate) menjadi tinggal 7 persen saja. Semua bidang ekonomi menyambutnya dengan positif dan optimis. Walau menurut Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, penurunan BI rate tersebut karena mekanisme pasar biasa, yaitu terjadinya penurunan tingkat harga pasaran (deflasi), namun salah satu penurunan instrument moneter memberikan iklim optimis kepada dunia usaha untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini.

Namun anehnya dunia usaha, sektor riil; industri dan pabrik, masih lesu dan tidak bergairah menyambutnya. Dunia industri masih terus menyampaikan harapan kepada perbankan, melalui media. Industri dan pabrik masih terus berharap agar perbankan menurunkan suku bunga kredinya hingga kisaran 10 persen.

Tentu saja sejak masa reformasi bidang moneter, suku bunga perbankan paralel dengan mekanisme pasar yang dinamis. Namun apakah mekanisme kapitalis ini harus diberlakukan murni? Bukankah tanpa industri dan pabrik, salah sektor ekonomi penyangga bisa menyebabkan rangkaian katastrofi krisis ekonomi nasional?

Di tengah keluhan sektor riil, marak kembali sektor properti dan perumahan menggelgar pameran. Hampir setiap hari, di media berbagai pameran properti dan pencetakan omzet penjualan miliaran rupiah diberitakan. Dunia properti nasional kembali bangkit. Ruko, apartemen, rumah kelas menengah atas ditawarkan dengan harga yang fantastis dan tidak masuk akal. Pameran perumahan dan properti itu tidak mungkin bergerak sendiri tanpa dukungan dari sektor perbankan.

Masih belum lama berlalu peristiwa yang menyeret Amerika Serikat ke jurang krisis finansial. Masih segar dalam ingatan kita, perusahaan perumahan terbesar AS; Fannie Mae dan Freddie Mac yang terseret krisis akibat para debiturnya gagal bayar *subprime mortgage* (sejenis Kredit Perumahan Rakyat/KPR). Kedua perusahaan properti itu pun menyeret lembaga keuangan dunia terbesar dunia Lehman Brothers dan perusahaan asuransi besar AIG.

Sebelum krisis keuangan global terjadi, Alan Greenspan, gubernur bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed), juga menurunkan suku bunga acuannya menjadi 1-2 persen. Ini mendorong suku bunga kredit di pasaran AS menjadi 5 persen. Sayangnya, suku bunga kredit perbankan yang kompetitif itu tidak tersalur kepada sektor riil. Justru kredit berbunga rendah tersebut mengucur deras ke sektor properti yang penuh dengan spekulasi.

Situasi di Indonesia saat ini mirip dengan awal-awal pemicu krisis ekonomi global. Perbankan seperti berlomba memberikan kredit ke sektor perumahan menengah dan properti. Berbeda dengan sektor perumahan menengah bawah. Sektor perumahan menengah bawah, sebagian besar dibutuhkan oleh orang yang belum memiliki rumah (*end user*). Berbeda rumah menengah atas, apartemen dan ruko. Jenis perumahan ini sarat spekulasi.

Jenis ini yang dipamerkan di berbagai kota Indonesia, setiap hari. Jenis perumahan ini, yang mendapatkan dukungan besar dari bidang perbankan. Sama seperti ketika AS mulai terjerat pada krisis finansial. Karena itu, dunia perbankan perlu mewaspada situasi ini. Perbankan perlu memikirkan sektor riil dan tidak terkonsentrasi pada sektor properti yang sarat spekulasi. Perbankan tidak hanya berpikir keuntungan semata, namun lebih jauh dari itu, harus mempertimbangkan kesehatan ekonomi bangsa secara keseluruhan. (\*\*)

Podium

Hasrullah



JK dan Opini Publik

HASIL Survei Nasional (*polling*) yang dilakukan Lembaga Riset Informasi (LRI) di 33 Provinsi pada tanggal 3-7 Mei 2009, menghasilkan data terbaru tentang gambaran khalayak tentang siapa sebenarnya presiden yang dipilih jika Pemilu diadakan esok hari. Dari data survei menunjukkan bahwa responden dengan pertanyaan pasangan mana yang akan di pilih pada saat Pilpres. Data pertama menunjukkan Mega-Prabowo (19,1 persen), JK-Wiranto (27,6 persen), SBY-Hidayat NW (36,2 persen), dan responden yang belum menentukan pilihan (17,1 persen). Sementara data kedua dengan pertanyaan yang sama menunjukkan Mega-Prabowo (20,2 persen), JK-Wiranto (27,3 persen), SBY-Hidayat NW (32,1 persen), dan yang belum menentukan (20,4 persen).

Dari data tersebut dapat diketahui kemungkinan Pilpres akan berlangsung dua putaran, karena masing-masing blok pasangan tak mempunyai angka yang dominan sehingga terjadi rivalitas politik dalam perolehan suara rakyat. Yang menarik dari data yang disajikan LRI ternyata, pasangan JK-Wiranto cukup konsisten terhadap penilaian responden, yaitu ada di angka kisaran (27 persen). Sementara pasangan Blok M dan Blok S belum menentukan siapa Cawapres dan tentu situasi demikian menguntungkan bagi pasangan Blok JK-WIN dalam penilaian publik.

Kemudian momentum politik JK-Wiranto dengan sikap yang tegas mendeklarasikan dirinya sebagai pasangan capres-cawapres, meyakinkan publik bahwa pasangan tersebut sangat konsisten dengan prinsip politik "lebih cepat lebih baik". *Tag line* ini tentu adalah momen politik untuk memilih pasangan JK-Wiranto yang ratingnya makin cenderung naik.

Apalagi JK dalam pernyataan komunikasi politik beberapa hari lalu di Makassar mengungkapkan secara jujur, posisinya dianggap sebagai "bamber" dalam berpasangan dengan SBY. Gelindingan pesan politik ke khalayak yang membacanya bahwa JK adalah "pahlawan yang dilupakan". Bahkan stigma politik yang muncul di khalayak akhir-akhir ini, yaitu JK merupakan motor penggerak dalam pemerintahan selama 4-5 tahun. JK orang yang dilupakan, disia-siakan, dan ditolak oleh SBY. JK pemimpin yang berkeriang dan pekerja keras. Dan diannya JK selama ini karena menghargai posisi sebagai orang nomor 2. Serta, SBY bagaikan kacang lupa akan kulitnya.

Jika stigma politik itu telah menjadi opini publik dan merupakan abstraksi dari khalayak komunikasi politik mulai dari lapisan elite politik hingga *grass root* dan telah menjadi kristal, maka bandul politik tersebut akan bergeser ke pasangan yang muncul dengan keberanian, kecekan, dan lebih baik. Bayang-bayang opini publik yang ada di kepala khalayak telah merekonstruksi "cerita-cerita" politik akibat dari komunikasi politik (Dan Nimmo, 1978). Efek penting yang diungkap Dan Nimmo dalam situasi bayangan-bayangan opini publik membawa empat hal penting dalam komunikasi politik; sosialisasi politik, partisipasi politik, mempengaruhi Pemilu, dan mempengaruhi elite dalam kebijakan politik.

Sudah menjadi perspektif dalam kajian komunikasi politik jika akurasi pengukuran pendapat melalui *survey/polling* dipadukan dalam kemasan pesan politik (iklan politik/propaganda), maka aura tokoh yang dianggap "dikhalani/dizalimi" akan mendapat simpatik dari rakyat. Sekarang, menghadapi Pesta Pemilu Presiden, kolaborasi antara kekuatan hasil *survey* dan mesin pencitraan akan keluar sebagai pemenang. Termasuk mempengaruhi 49,6 juta rakyat tak memilih dalam Pemilu legislatif dan menggarap pemilihan pemilu 51 juta suara (30 persen dari total pemilih DPT) dalam Pemilu 8 Juli mendatang! ■

Penegakan Hukum; Antara Law in Book dan Law in Action



Wiwin Suwandi  
Peneliti Hukum, HAM dan Demokrasi pada PSP-HAM Unhas Dan PuKAP-Indonesia

Dalam Indonesia Law and Society (1999), Timothy Lindsey mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis. Kekuasaan negara di dalamnya, harus tunduk pada aturan main.

KETIKA reformasi digulirkan pada tahun 1998, banyak pihak berharap konsistensi penegakan aturan hukum tanpa pandang bulu berdasarkan prinsip *equality before the law* (persamaan di depan hukum) dilaksanakan. Peralihan kekuasaan antar-rezim menjanjikan sebuah harapan ke arah kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sejarah kelam rezim Orba yang memnodurakan penegakan hukum dan merekayasa bahasa hukum untuk melanggengkan kekuasaan mengakibatkan hilangnya tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hukum di jalankan di atas pembungkaman dan keputra-putran.

Harapan para pihak agar reformasi yang digulirkan melahirkan tatanan kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan bernegara bukannya tanpa alasan. Dalam proses kelahiran era reformasi merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap keadaan lama (*status quo*) rezim Orba yang menerapkan monopoli politik. Monopoli yang tidak juga membawa Indonesia keluar dari kungkungan krisis ekonomi pada paruh 1997. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, utang luar negeri menumpuk, korupsi merajalela, delegitimasi politik atas hukum yang sedemikian kuat, dan penurunan kepercayaan rakyat atas kepemimpinan elite hingga menimbulkan reaksi keras menuntut perubahan merupakan gejala sosial yang menuntut pemecahan secara cepat dan cermat.

Dalam konsep penegakan hukum, era reformasi menginginkan suatu perubahan paradigma hukum yang dapat menciptakan sistem sosial yang lebih demokratis dan dapat menyerap aspirasi rakyat tanpa pandang bulu. Sebuah paradigma yang tidak hanya melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam KUHPI/KUHAP dan beberapa peraturan tertulis lainnya. Bukan pula paradigma hukum yang tidak mampu menembus tembok-tembok birokrasi yang buta dan tuli dalam tujuannya menciptakan keadilan bagi rakyat. Namun sebuah paradigma yang memiliki visi yang jelas. Visi mewujudkan negara hukum yang demokratis, aspiratif dan akomodatif. Penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai penghargaan terhadap konsep ke-

daulatan rakyat.

Hukum dan Politik; Hubungan Tuan dan Budak

Tidak salah memang ketika banyak pihak yang mengatakan bahwa dalam proses pemilu yang sementara berjalan, kedaulatan hukum telah digadai demi tujuan politik. Hal ini wajar mengingat hukum adalah produk politik. Hukum dan politik adalah hubungan "tuan" dan "budak", atasan dan anak buah. Hukum dari awal keberadaannya tetap sebagai ilmu yang konsisten menjaga prinsip-prinsip independensi dan universalitasnya, namun intervensi politik yang terkadang membuat hukum lebih menonjolkan sisi individualitas sehingga kehilangan makna aslinya. Dalam hal ini undang-undang pemilu ibarat pisau bermata dua, tidak saja menjadi sarana politik sebagai proses regenerasi pemerintahan namun juga menjadi produk politik yang penuh dengan "jebakan". Pintu jebakan bagi pihak-pihak yang tidak berdedikasi.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, proses pelaksanaan pemilu diwarnai cerita-cerita memilukan dari aib demokrasi. Kilauan materi dan mahalnya ongkos politik telah mempreteli idealisme aparat hukum yang melanggar sumpahnya mewujudkan pemilu yang transparan, jujur, adil dan bermartabat dengan terlibat dalam skandal seperti manipulasi suara. Abdi negara yang bekerja dibawah sumpah undang-undang pemilu, telah memilih jalan yang salah dengan menggadaikan kepercayaan rakyat.

Bahasa hukum melalui undang-undang pemilu tidak di maknai sebagai sarana dalam menyampaikan aspirasi politik secara jujur dan bertanggung-jawab untuk membangun kualitas kehidupan bernegara yang lebih kuat. Tetapi lebih dilihat sebagai objek menjanjikan eksploitasi materi dari skandal manipulasi suara. Dedikasi dan profesionalisme menjadi barang usang yang bisa digadaikan sewaktu-waktu. Pelaksanaan pemilu telah melahirkan fenomena baru, fenomena "tuan" dan "budak".

Dalam kekisruhan pemilu yang sementara ramai dibicarakan, elite politik yang merasa kepentingannya dilanggar maupun karena jumlah perolehan suaranya relatif kecil, menganggap pelaksanaan pemilu diakibatkan lemahnya koordinasi dalam hierarkis satuan kerja hingga tidak sedikit di antara mereka yang mengugat KPU

karena dinilai gagal dalam permasalahan DPT. KPU sebagai pihak yang merasa dipojokkan membela diri dengan berpatokan pada undang-undang pemilu. Saling tuding sebagai pihak yang paling benar membuat legitimasi pemilu diragukan menurut sebagian orang. Jadilah proses pemilu sebuah sinetron politik yang sarat kepentingan dan jauh dari substansi demokrasi.

Dalam proses ini kemudian, pesimisme rakyat akan lahirnya sebuah pemerintahan yang kuat kian terbuka dengan menu-runnya legitimasi hasil pemilu. Respons masyarakat sangatlah sederhana. Bagaimana mungkin menggantungkan harapan pada sebuah sistem yang proses pelaksanaannya diragukan karena cacat hukum? Bagaimana mungkin keterwakilan aspirasi politik masyarakat hanya berkisar sepersekian persen dari jumlah dua ratus dua puluh juta penduduk? Dan bagaimana mungkin nasib dua ratus dua puluh juta penduduk ditentukan oleh kalkulasi politik partai yang juga terbukti hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri?

Setengah Hati

Di Indonesia, konsistensi penegakan hukum untuk mewujudkan kedaulatan hukum masih terkesan diterapkan setengah hati. Bahasa hukum masih dimaknai hanya sebatas teks-teks mati, bukan sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan tiga tujuan hukum; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Klimaks dari proses pemilihan umum sebagai bagian dari alur perjalanan demokrasi yang mulai digulirkan pada tahun 1999, terlihat belum mampu menghasilkan formula baku yang mampu membuktikan bahwa kita adalah negara yang betul-betul menerapkan konsep negara hukum secara konsisten.

Ibarat kain yang sobek, negara hukum kita penuh dengan tambalan-tambalan. Prestasi empat kali amandemen UUD 1945 dalam kurun waktu 1999-2002 belum mampu membersihkan lembaga-lembaga negara dari praktik haram korupsi. Perkembangan korupsi di Indonesia bukan karena kekurangan instrumen hukum. Bahkan (kalau boleh saja simpulkan), dibandingkan negara lain, Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak instrumen hukum pemberantasan korupsi. Ditambah lagi dengan lembaga superbody seperti KPK dan Pengadilan Tipikor yang membuat nyali koruptor

menjadi ciut. Namun korupsi tumbuh subur dan sulit dihilangkan di Indonesia karena kita masih belum menghargai dan menghormati hukum. Kita masih memandang setengah hati konsep penegakan hukum yang diwacanakan.

Membaca klimaks dari alur pemilu, setidaknya ada beberapa masalah yang untuk beberapa tahun ke depan, masih sulit untuk bisa diselesaikan. *Pertama*, penegakan hukum akan selamanya menjadi mimpi di siang bolong karena karakter politik yang cenderung membatasi kedaulatan hukum. Ketika berhubungan dengan kepentingan elite, maka bahasa hukum diselwengkan untuk sekadar mencari selamat dan nama baik partai terjaga. Hal ini dimaklumi mengingat produk hukum yang dihasilkan cenderung mengikuti selera partai di parlemen.

*Kedua*, konsep kemandirian ekonomi masih jauh dari harapan (jauh panggang dari api) karena formula regulasi ekonomi yang dihasilkan di parlemen terjemak konsep kapitalisme global yang mengikuti selera pasar (*market*). Dalam mekanisme *free market*, konsep ekonomi kerakyatan akan susah bertahan di tengah serbuan produk asing yang tidak saja unggul dari segi merek dan kualitas, tetapi karena faktor teknologi. Dengan model ekonomi yang diterapkan sekarang ini, Indonesia dengan kekayaan alamnya, selamanya akan menjadi negara penyokong utama sumber bahan baku yang ketika di produksi di negara-negara industri besar, dikirim kembali ke Indonesia dengan harga pasar yang jauh lebih mahal.

*Ketiga*, regulasi yang melindungi objek-objek vital negara (yang perlindungannya dijamin dalam pasal 33 UUD 1945) masih cenderung membuka wilya eksploitasi yang luas bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Banyak fakta yang menunjukkan kerusakan ekologi akibat eksploitasi berlebihan sumberdaya alam diakibatkan regulasi lokal dan nasional yang terlalu longgar terhadap investasi asing.

Namun sumber utama dari permasalahan ini adalah aturan hukum (*rule of law*) kita yang tidak konsisten membahasakan Indonesia sebagai negara hukum. Aturan hukum kita hanya sebatas slogan, bukan tindakan. *Law in book* (hukum dalam teks/bahasa) berbeda dengan *law in action* (hukum dalam penerapannya). ■

KOREKSI Saran & Kritik

Rubrik ini berisi koreksi atau ralat berita, foto, atau tulisan yang telah dimuat di harian ini. Rubrik ini juga diperuntukkan bagi pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik terhadap Harian Fajar, atau instansi terkait di daerah ini. Caranya; Ketik SB (spasi) Isi SMS (maksimal 160 karakter) kirim ke 3963 (khusus Telkomsel), atau ketik KF (spasi) Isi SMS, kirim ke 9123 (semua operator)

SMS Pembaca



PAK KAJATI SULSEL, kenapa saksi A Irsan Idris Galigo dalam kasus KTP dan KK di Bone dihapus dalam BAP kejaksaan? Ada apa ini? 6281343548080

DIRUT BANK MANDIRI SULSEL, mengapa Bank Mandiri tidak ada di Tana Toraja, khususnya di Rantepao? 62811465705

6281241898346

PERBAIKAN NEGERI TIDAK HARUS dengan memilih karena sesuku, tapi kadar konsistensi dan keberpihakan pada rakyat dan jejak kaki yang tidak *terimage* sebagai pedagang HAM. 62811465705

ASPIRASI SEPEKAN

"Harapan Terhadap Walikota Baru"



Perbaiki Jalan Rusak

Saya berharap walikota yang baru lebih memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat. Khususnya infrastruktur jalan yang masih banyak rusak di dalam kota. Malah ada yang rusak bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan. (ram)

Abu Talib  
Pegawai Swasta

Perhatikan Pendidikan

HARAPAN saya kepada walikota yang baru supaya memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, dan kebersihan. Masih banyak warga yang belum menikmati pendidikan. Hal ini perlu mendapat perhatian demi kemajuan daerah. (ram)

Efitrianty Nur  
Karyawan Lembaga Manajemen Patria



Kebersihan Lebih Utama

KONDISI Makassar akhir-akhir ini sudah semakin jorok di beberapa titik. Saya berharap Walikota Ilham Arif Sirajuddin lebih memperhatikan kebersihan kota. Jangan nanti kejar Piala Adipura baru menggenjot kebersihan. (ram)

Rahma WR  
Warga Batua

Bagi yang berminat berkomentar, bisa menghubungi redaksi Harian Fajar setiap jam kerja di 0411-441441 (Rahma) atau mengirim komentar melalui [opini@fajar.co.id](mailto:opini@fajar.co.id). Suara dan aspirasi akan kami maut jika dilengkapi alamat dan foto identitas yang jelas.

**FAJAR**  
Harian Pagi

■ Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, semua wartawan Harian Fajar dibekali tentang pengenalan dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari siapapun, dalam bentuk apapun, serta dengan alasan apapun.

■ Semua penulis Opini/Artikel serta Kolom Lepas hendaknya mencantumkan Nomor Rekening. Nasib yang ditrima ke Redaksi menjadi milik Harian Fajar. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis bersangkutan.

**Pemimpin Umum:** H. M. Alwi Hamu  
**Wakil Pemimpin Umum:** H. Syaamsu Nur

**Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:** Sukriansyah S. Latief  
**Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil Penanggungjawab:** Muhammad Yusuf AR, Faisal Syam

**Redaktur Pelaksana:** Uslimin, Silahuddin Genda

**Koordinator Liputan:** Ruslan Rami; **Sekretaris Redaksi:** Fitriany Solong  
**Dewan Redaksi:** H. M. Alwi Hamu, Sukriansyah S. Latief, H. Syaamsu Nur, Nur Alim Djali, Muhammad Yusuf AR, Faisal Syam, Suwardi Thahir, Subhan Yusuf, Fuad Rumi, Ishak Ngeljaratan, Aidir Amin Daud, Piet Heriady Sanggelorangan, MS Kartono, Zulkifli Gani Ottoh, **Staf Redaksi:** Anita A. Amier, Basir Kadir, Basri, Budi Maktum, Dian Hendyanto, Eriwati, Fachrudin Palapa, Mahdar Tayyag, Muhammad Ilham, Sunarti Sain, Zainuddin Saleha; **Reporter:** Anggi S. Ugart, Arsyad Hakim, Mukhlis Amans Hady, Nasri Aboe, Syaifuddin, Syaikhon Azzuhy Ruma, Syaifa Aida, Yulhidair Ibrahim; **Fotografer:** Irfan, Slamet Riyadi, **Koordinator Produksi:** Fadli Sunarya, **Koordinator Pracetak/Grafis:** Burhanudin Sakti, Aji Nur, **Asisten:** MS Kartono, Syaifuddin, Khaili Biro  
**Pemberitaan Jakarta:** Yusuf Said, Baharuddin Moenta; **Redaksi Malam:** (0411) 442969 - 441441  
**Modem:** (0411) 447510 **Email:** [fajar@fajar.co.id](mailto:fajar@fajar.co.id); [fajarupp@indosat.net.id](mailto:fajarupp@indosat.net.id); [redaksi@fajar.co.id](mailto:redaksi@fajar.co.id) **Percetakan** : PT. FAJAR JAWA RAYA - Jl. Urip Sumoharjo No.20 Makassar **Alamat Perwakilan Jakarta:** Mu'min Rolle - Jl. Palmerah Barat (Komp.Widuri); No. 353 Telp.(021) 5322632 - Fax(021) 5322629 **Harga Langganan:** -Makassar dan Luar Kota (Sulsel): Rp 70.000,-/Bulan - Luar Sulsel: Rp 70.000,-/Bulan - Eceran dalam Kota: Rp 3.000,-/Eksplorasi-Daerah lain disesuaikan ongkos kirim. **Tarif Iklan:** Umum (BW): Rp 23.000,-/mm kolom - Wkms: Rp 37.000,-/mm kolom

**Penerbit:** PT. Media Fajar, **SIUPP:** No. 085/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986 Tgl. Maret 1986  
**Direktur Utama:** H. M. Alwi Hamu; **Wakil Direktur Utama:** H. Syaamsu Nur  
**Direktur Produksi/SDM:** Sukriansyah S. Latief; **Direktur Keuangan:** Ridwan Arief; **Direktur Pemasaran:** M. Agus Salim Alwi  
**Wakil Direktur:** Nur Alim Djali, Sahel Abdullah, Abd Halq  
**Pembiha:** H. Dahlan Iskan **Komisaris Utama:** A. Syaifuddin Makka, **Komisaris:** Ny Dorothea Samola, Zulkifli Gani Ottoh, S. Sinansari ecip, Hatta A. Hamu.  
**BPP Fajar Group:** H. Syaamsu Nur (Ketua), Irwan Zainuddin (Sekretaris), Zoel Dirgha Dinhi (Auditor)  
**Ombudsman:** Munjin S. Asy'ari (Ketua) Ridwan J. Silamma, SH, Nazruddin Pasigai, **Sekretaris:** Irwan Zainuddin, **Manajer Iklan:** Nur Hayat **Staf:** Nur Alim, Nirmal, Dwiyani Pritahat, Nasrullah Rahim, Ikae Rahmawati; **Manajer Sirkulasi:** Ardi S; **Promosi:** Firdaus Nur, Abd. Karim Alwi; **Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Jl. Urip Sumoharjo No.20 Makassar - Telp. (0411) 441441 (Hunting) **Iklan:** (0411) 440234, **Sirkulasi:** 440222 Fax. **Tata Usaha:** (0411) 441224 - Fax. **Redaksi:** (0411) 441225, **Kantor Perwakilan Iklan dan Sirkulasi:** Jl. Botolempangan No. 3 Makassar Telp. (0411) 331022 **Biro:** Syaamsu, (Parepare) B.J. Andi Garmi No. 45, Telp. (0421) 22528-25217; Ahmad Azhar, (Bone) Jl. A. Yani No. 25 Telp. (0481) 22483; Rustan Bedman (Palopo) Jl. Jend. Sudirman No. 94B Telp. (0471) 21190, Anrullah Basri, (Sengkang) Jl. KH. As'ad No. 45 Telp. (0485) 323111, M. Darnial, (Polemas) J.I.A. Depu No 39 Telp. (0428) 23207; Hamzah, (Bulukumba) Jl. Andi Mappijalang Telp. (0413) 82555; Dewi Puspita (Pangkep); Abu Bakar (Sinjai) Mahatir (Takalar); **Bank:** -BUKOPIN R/C 1003067081 - BNI 46 Sudirman Makassar R/C No. 0065.665.314 - BNI Giro Nitro R/C No. 008 319 9564 - BNI 46 Kebayoran Baru Jakarta R/C No. 022.000032455.001 - Bank Mandiri Giro Panakukang No. Rek. 152-000-9200001-3. BRI Sombaopu Makassar R/C No. 31-51-0002.

**FAJAR**  
www.fajar.co.id  
on line

**General Manager/Penanggung Jawab:** Mustafa Kufung  
**Manajer Iklan:** Ihsan DJ  
**Manajer Teknik:** Khaili Syaamsu  
**Manajer Keuangan:** Hajeriah, SE  
**Alamat Redaksi:** Jl. Urip Sumoharjo No.20 Makassar - Telp. (0411) 441441 (Hunting), (0411) 441225 (Fax).